

## **ABSTRAK**

### **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LELAKI DEWASA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*)**

**Oleh**

**Annisa Cesariskia Fasya**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan serta perlindungan hukum terhadap lelaki dewasa yang menjadi korban perkosaan. Dalam melakukan analisa hukum, peneliti menggunakan teori asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dan teori perlindungan hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data antara lain terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa asas persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terhadap lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana perkosaan belum terimplementasi di dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana pasal tersebut merupakan dasar pengaturan perkosaan di Indonesia. Selanjutnya, merumuskan pasal pemerkosaan netral gender menjadi upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada lelaki dewasa korban tindak pidana perkosaan.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah diharapkan agar para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam merumuskan kebijakan, khususnya merumuskan pasal tindak pidana pemerkosaan memperhatikan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) serta hendaknya segera mengesahkan pasal pemerkosaan netral gender sebagaimana pada Bagian III Pasal 473 ayat (1) RUU KUHP selaku *ius constituendum* atau hukum yang dicita-

*Annisa Cesariskia Fasya*

citakan di masa mendatang dengan harapan ketika rancangan tersebut disahkan sebagai *ius constitutum* atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dapat melindungi lelaki dewasa sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, baik secara preventif maupun represif.

**Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Hukum, Lelaki Dewasa Korban Perkosaan**

## **ABSTRACT**

### **THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION OF ADULT MEN AS VICTIMS OF THE CRIMINAL ACTION VIEWED FROM THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN THE LAW (EQUALITY BEFORE THE LAW)**

**By**

**Annisa Cesariskia Fasya**

This research was aimed to understand the practice of a principle called equality before the law towards adult men as a victim of rape. In doing so, the researcher use the principle of equality of law and legal protection theory.

This research is using normative juridical and empirical juridical legal methods. The data are gathered through primary data and secondary data. And the interviewees are Lecturer in Criminal Law and Lecturer in Constitutional Law at the University of Lampung. Data collection methods through library research and field studies. Meanwhile, the method analysis used is qualitative analysis.

The result and discussion of this research shows that the principal of equality before the law that is regulated in Article 27 paragraf (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia about an adultmen as a victim of rape is still not being implemented onto the Article 285 Indonesian Penal Code (KUHP) considering it is the fundamental law of sexual assault law in Indonesia. Additionally, making a gender neutral law about rape in Indonesia can be one of the solution to give legal protection for an adult men as a victim of rape.

The suggestion that the author can convey in this study is that it is hoped that the legislators in formulating policies, especially formulating articles on the criminal act of rape pay attention to the principle of equality before the law and should immediately pass gender-neutral rape articles as in Section III Article 473 paragraph (1) Draft Criminal Code as *ius constituendum* or law aspired to in the future with the hope that when the draft is passed as *ius constitutum* or established law (positive law) it can protect adult men as victims of rape, both preventively or repressively.

**Keywords: Urgency, Legal Protection, Adult Male Rape Victims**